

**PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LINTAS BATAS AKIBAT  
KEBOCORAN SUMUR MINYAK MONTARA AUSTRALIA MENURUT  
KONVENSI HUKUM LAUT 1982**

**ARTIKEL ILMIAH**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**ARLY SUMANTO**

NIM. 0810113023

Program Konsentrasi Hukum Internasional



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2013**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LINTAS BATAS  
AKIBAT KEBOCORAN SUMUR MINYAK MONTARA AUSTRALIA  
MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982**

Oleh:

**ARLY SUMANTO**

NIM. 0810113023

Disetujui di Malang, 05 Juni 2013

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**Nurdin, S.H. M. HUM**  
**NIP. 19561207 198601 1 001**

**Heru Prijanto, S.H. M.H**  
**NIP. 19560202 19850 1 003**

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional

**Nurdin, SH, MHum**  
**NIP: 19561207 198601 1 001**

## RINGKASAN

**ARLY SUMANTO, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2013, *Penyelesaian Pencemaran Lintas Batas Akibat Kebocoran Sumur Minyak Montara Australia Menurut Konvensi Hukum Laut 1982*, Nurdin, S.H. M. HUM; Heru Prijanto, S.H. M.H.**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas apakah yang melatarbelakangi sengketa pencemaran lintas batas antara Indonesia dengan Australia di Laut Timor. Hal ini dilatarbelakangi munculnya berita di kalangan masyarakat bahwa konflik dipicu karena kedua negara memiliki alasan serta tindakan masing-masing dalam penanggulangan pencemaran lintas batas yang terjadi, tanpa memperhatikan dampak terhadap lingkungan maupun masyarakat disekitar lingkungan tempat pencemaran terjadi.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatifm mengkaji dan menganalisis pencemaran lintas batas lingkungan laut yang dilakukan australia terhadap lingkungan laut Indonesia dalam perspektif hukum internasional. Permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan-peraturan yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, teori-teori hukum dan doktrin- doktrin para sarjana hukum terkemuka. Penulis mengumpulkan data primer dari Konvensi Internasional, Undang-Undang Nasional masing-masing negara. Sedangkan data sekunder penulis peroleh menggunakan studi kepustakaan atau literatur, metode penelusuran situs di internet serta metode dokumenter. Analisa data deskriptif analitis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan internasional di bidang perlindungan terhadap lingkungan khususnya laut dari pencemaran.

Hasil yang penulis peroleh adalah bahwa sengketa pencemaran lintas batas antara Indonesia dengan Australia yang terjadi disekitar laut Timor belum terselesaikan hingga saat ini, dikarenakan setiap negara tidak dapat memberikan pembuktian yang kuat di mata hukum, sehingga menyebabkan sulitnya melakukan penentuan

penggunaan hukum yang akan diberlakukan terhadap kasus pencemaran lintas batas tersebut.

Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, penulis memiliki beberapa saran. Pertama, Pemerintah Indonesia dengan Australia sepakat melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan pembuktian yang valid terkait pencemaran serta dalam hal penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh kedua negara saja tanpa memerlukan bantuan pihak ketiga.

**Kata Kunci :** Pencemaran Lintas Batas, Kilang Minyak Montara Australia

## SUMMARY

**Arly Sumanto, International Law, Faculty of Law, Brawijaya University, February 2013, *Resolution on Transboundary Pollution Due to Australia's Montara Oil Well Leaks According to Convention on the Law of the Sea 1982*, Nurdin, SH M. HUM; Heru Prijanto, S.H. M.H.**

In writing this essay, the author discusses whether the background of transboundary pollution dispute between Indonesia and Australia in the Timor Sea. This motivated the emergence of news among the public that triggered the conflict as both countries have a reason and each action in the prevention of transboundary pollution occurs, without memperhatikan impact on the environment and communities around the neighborhood where pollution occurs.

To answer these problems, the approach that I use is normatifm judicial review and analyze transboundary pollution marine environment is carried australia Indonesian marine environment in the perspective of international law. Legal issues to be object of study was analyzed based on sources such as applicable regulations, principles of law, legal theories and doctrines of the leading legal scholars. Authors collected primary data from the International Convention, the National Law of each state. While the authors of secondary data obtained using literature studies or literature, methods of search sites on the internet as well as the methods of documentary. Descriptive data analysis is used to analyze various international regulations in the field of protection of the marine environment from pollution in particular.

The results obtained are writers that transboundary pollution dispute between Indonesia and Australia that occur around the Timor Sea have not been resolved until now, because every country can not provide strong evidence in the eyes of the law, thus making it difficult to carry out the determination of the use of the law to be applied to the case transboundary pollution.

Responding to the facts mentioned above, the author has some suggestions. First, the Government of Indonesia and Australia agreed to direct research into the field to obtain valid evidence related pollution and in terms of dispute resolution can be carried out by both countries without requiring third-party assistance.

**Keywords:** Transboundary Pollution, Oil Refine

## **PENDAHULUAN**

### **LATAR BELAKANG**

Lingkungan hidup merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan manusia. Selain menjadi tempat tinggal, lingkungan hidup juga menjadi penyedia sumber daya alam yang menjadi pemenuh kebutuhan manusia.<sup>1</sup> Salah satu bagian dari lingkungan hidup tersebut adalah laut. Laut memiliki peran besar dalam penyediaan sumber daya alam yang tidak terbatas bagi manusia. Pengelolaan sumber daya di laut memberikan manfaat yang besar bagi manusia. Namun dalam pengelolaan lingkungan laut tersebut, tentunya memiliki dampak terhadap lingkungan laut itu sendiri.

Untuk bisa tetap mempertahankan dan melestarikan sumber daya tersebut, maka salah satunya adalah dengan memberikan perhatian dalam perlindungan dan pelestarian wilayah lingkungan laut. Oleh karena itu maka dibutuhkan suatu alat yang dapat mengontrol pihak yang melakukan pengelolaan lingkungan laut. Antara lain adalah dengan diadakannya suatu perangkat hukum yang isinya mengatur dan membantu dalam pelestarian lingkungan laut tersebut.

Salah satu masalah terbesar dalam pelestarian lingkungan laut adalah adanya pencemaran. Pencemaran lingkungan laut semakin banyak mendapat perhatian dari mata dunia internasional.<sup>2</sup> Hal tersebut disebabkan oleh karena sekarang ini dampak yang diakibatkan oleh aktifitas suatu Negara dalam melakukan pengelolaan laut mulai mengganggu ketersediaan sumber daya alam tersebut baik bagi Negara pantai itu sendiri maupun bagi Negara – Negara lain dalam hal ini adalah Negara tetangga yang bersinggungan garis pantainya.

Pada awalnya pencemaran yang sedikit mungkin tidak akan terlalu menjadi masalah bagi Negara pantai maupun Negara lain, hal ini dikarenakan laut masih memiliki kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri, dengan tetap

---

<sup>1</sup> J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 4.

<sup>2</sup> Hal ini dimulai dari peluncuran kapal pengangkut minyak pertama Gluckauf pada 1885, serta terjadinya pencemaran laut terbesar yang pernah ada ketika tanker Torrey Canyon yang kandas di pantai selatan Inggris menumpahkan 35 juta gallons crudel oil di barat daya perairan inggris pada tahun 1967.

mempertahankan fungsi dari laut itu sendiri. Hanya saja semakin dewasa ini seiring dengan meningkatnya teknologi membuat pemakaian laut semakin tinggi dan berakibat masuknya zat – zat baru ke dalam laut, ditambah zat – zat yang sebelumnya telah ada mengakibatkan penumpukan yang membuat laut menjadi kotor dan berkurang kualitasnya sehingga berpengaruh kepada daya guna serta fungsi dari laut itu sendiri.

Dalam hal ini penulis mengambil salah satu kasus terjadi pada tahun 2009 lalu, dimana salah satu perairan di Indonesia tercemar oleh tumpahan minyak yang diakibatkan oleh negara lain. Tumpahan minyak tersebut berasal dari semburan ladang minyak di Australia yang bernama Montara. Proyek minyak lepas pantai tersebut gagal dalam melakukan pengeboran pada 21 Agustus 2009 lalu sehingga minyak yang berasal dari dasar laut menyembur dan mengotori perairan Australia dan menyebar hingga melewati batas ZEE Indonesia. Pencemaran ini merupakan masalah yang sangat penting bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa pencemaran sudah memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif itu sendiri diartikan sebagai suatu daerah diluar laut territorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut territorial, dimana Negara pantai memiliki hak - hak lebih di dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif ini. Antara lain adalah Hak - hak untuk berdaulat. Perlu dilihat disini adalah bahwa perbedaan ZEE dengan Laut Territorial adalah bahwa di dalam ZEE Negara pantai hanya dapat menikmati hak – hak berdaulat, bukan kedaulatan penuh.<sup>3</sup>

Akibat dari pencemaran tersebut, maka akan ada dampak yang dirasakan oleh Indonesia. Berbicara mengenai dampak jangka pendek dari pencemaran ini, hal tersebut akan dirasakan langsung oleh penduduk yang daerah sekitar (nelayan NTT). Sebagai contoh adalah usaha budidaya kelautan dan perikanan di Timor barat, Pulau Rote, Sabu dan Sumba gagal total. Padahal hampir sebagian besar warga NTT menggunakan wilayah laut timor sebagai mata pencahariannya. Hal ini mengakibatkan nasib kurang lebih 17 ribu warga NTT yang menggantungkan

---

<sup>3</sup> Heru Prijanto *Hukum Laut Internasional*



hidupnya dari laut terancam.<sup>4</sup> Sedangkan dampak jangka panjang yang diakibatkan dari pencemaran ini antara lain adalah terancam punahnya ekosistem kelautan seperti Ikan tuna, paus, lumba-lumba, pari, hiu, dan tujuh spesies penyu laut yang berada di daerah laut timor ini. Hal ini diperburuk dengan meluas ke perairan di sekitar Kabupaten Rote Ndao, bahkan hingga Laut Sawu, terutama sekitar Kabupaten Sabu Raijua dan pantai selatan Pulau Timor.<sup>5</sup>

Dalam *United Nation Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS 1982) pasal 192 mengenai pencemaran pada laut lepas dinyatakan bahwa :

“Negara – Negara diwajibkan untuk melindungi dan memelihara lingkungan kelautan sesuai dengan aturan – aturan internasional dan perundang – undangan nasional”.

Selain pasal tersebut, perlindungan lingkungan laut terutama dalam hal pencemaran karena tumpahan minyak juga diatur dalam instrument hukum internasional lainnya. Diantaranya “Konvensi Jenewa 1958” mengenai rezim laut lepas yaitu pada pasal 24, yang berbunyi :

*“Every state shall draw up regulations to prevent pollution of the seas by the discharge oil from ships of pipelines or resulting from the exploitation and exploration of the seabed and its subsoil taking account to the existing treaty provisions on the subject”.*

(setiap negara wajib mengadakan peraturan-peraturan untuk mencegah pencemaran laut yang disebabkan oleh minyak yang berasal dari kapal atau pipa laut atau yang disebabkan oleh eksplorasi dan eksploitasi dasar laut dan tanah dibawahnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan perjanjian internasional yang ada mengenai masalah ini).

Kemudian ada juga Deklarasi Stockholm tahun 1972 yang terdiri dari 26 asas, dimana pada asas ke 7 dikatakan bahwa :

---

<sup>4</sup> <http://rahmawidhiasari.blogspot.com/>, “*Mengkritisi Kelambatan Pemerintah dalam Penyelesaian Pencemaran Minyak Montara*”. Senin, 05 Maret 2012. Diakses pada tanggal 16 agustus 2012

<sup>5</sup> <http://indomaritimeinstitute.org/?p=274>, “*Pencemaran Lingkungan , Tumpahan Minyak dari Celah Timor Rusak Ekosistem Laut*”. 24 Juli 2010, 2:56 am. Diakses pada tanggal 16 agustus 2012

*“State shall take all possible steps to prevent pollution of the seas by substance that are liable to create hazard to human health, to harm living resources and marine life, to damage amenities or to interfere with other legitimate uses of the sea”.*

(negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan guna mencegah pencemaran laut yang membahayakan kesehatan dan kesejahteraan manusia, sumber kekayaan hayati laut terhadap penggunaan lingkungan laut).

Namun sangat disayangkan, dikarenakan walaupun instrument yang mengatur tentang perlindungan terhadap kelestarian lingkungan khususnya laut telah ada dari dulu, namun dalam pelaksanaannya tetap saja tidak sepenuhnya bisa berjalan dengan baik. Masih sering terjadi kasus pencemaran lingkungan khususnya laut, bahkan dewasa ini pencemaran laut semakin menjamur dimana – mana baik itu diakibatkan oleh kapal, pengeboran ataupun sampah – sampah yang dibuang sembarangan. Sangat penting untuk mengetahui secara mendalam mengenai bagaimanakah hukum internasional memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan laut. Selain itu Tindakan-tindakan apakah yang seharusnya ditempuh oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa pencemaran lintas batas Indonesia yang dilakukan oleh Australia. Sehingga Penulis mengambil judul ***“Penyelesaian Pencemaran Lintas Batas Akibat Kebocoran Sumur Minyak Montara Australia Menurut Konvensi Hukum Laut 1982”***.

#### **Rumusan Masalah :**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya – upaya yang dilakukan oleh kedua negara yang bersangkutan dalam menyelesaikan masalah tersebut?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan ketentuan yang diatur dalam konvensi hukum laut 1982 terkait dengan penyelesaian pencemaran lintas batas tersebut?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu mengkaji dan menganalisis pencemaran lintas batas lingkungan laut yang dilakukan australia terhadap lingkungan laut Indonesia dalam perspektif hukum internasional. Penelitian Yuridis Normatif (*normatief legal*) disini dimaksudkan bahwa, permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan-peraturan yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, teori-teori hukum dan doktrin- doktrin para sarjana hukum terkemuka. Dilakukannya jenis penelitian Yuridis Normatif dikarenakan sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*).<sup>6</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini yaitu pendekatan perundang-undangan/*statute approach*<sup>7</sup> yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema sentral peneliti yakni tinjauan penerapan doktrin *Pre-emptive Military Strike* sebagai perlawanan terhadap terorisme dalam perspektif hukum internasional. Kemudian pendekatan selanjutnya yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu model pendekatan *Case Approach*/pendekatan kasus, dimana pendekatan dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Muhamad Muhdar, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum: Sub Pokok Bahasan Penulisan Hukum Skripsi*, Balikpapan, 2011, Hal 10

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, , 2006, hal 295.

<sup>8</sup> Ibid, hal 321.

## PEMBAHASAN

### 1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua negara yang bersangkutan dalam menyelesaikan masalah.

Masalah ini bermula dari ledakan yang terjadi di *rig* West Atlas pada tanggal 21 Agustus 2009, yaitu ketika sebuah *platform* sumur minyak Montara di Laut Timor yang terletak sekitar 690 km arah barat Darwin mengalami kegagalan dalam pengeboran minyak sehingga mengakibatkan ledakan yang terjadi pada salah satu pipa penyalur minyak dari dasar laut ke permukaan. Lokasi kilang minyak tersebut memang berada dalam yurisdiksi Australia, namun yang menjadi masalah adalah ketika tumpahan minyak tersebut memasuki yurisdiksi negara lain yang dalam hal ini adalah Indonesia. Ledakan kilang minyak tersebut mengakibatkan perairan Australia Barat, Timor Leste dan Indonesia tercemar oleh minyak mentah, dimana tumpahan minyak tersebut berlangsung selama 74 hari, hingga 3 November 2009. Tumpahan minyak tersebut menggenangi areal seluas 2500 mil persegi pada 30 Agustus 2009; kemudian pada 3 September 2009 mulai memasuki wilayah Indonesia dengan posisi pada tanggal 29 September 2009 berada sejauh sekitar 50 mil dari batas wilayah perairan laut antara Indonesia-Australia. Sejak itulah hasil tangkapan laut nelayan serta aktivitas ekonomi masyarakat pesisir Provinsi NTT merosot tajam, hingga tinggal delapan persen dari hasil normal sebelum pencemaran terjadi. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia

- 2 Oktober 2009 : Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tanggal membentuk posko untuk memonitor tumpahan minyak Montara langsung ke lapangan.
- 6 Oktober 2009 : Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) mengirim sampel air untuk diteliti.
- 15 Oktober 2009 : WWF Indonesia membuat *press release* tentang kasus Montara dan mendorong Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah Australia untuk melindungi kawasan Coral Triangle.
- Oktober-November 2009 : Beberapa menteri RI (Luar Negeri, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, serta Lingkungan) melakukan

koordinasi untuk menangani isu minyak Montara dan menunjuk Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, yang diketuai Freddy Numbet, untuk bernegosiasi tentang kompensasi.

- 11 Mei 2010 : YPTB mengirim dokumen klaim kepada Pemerintah Australia.
- 15-17 Juli 2010 : Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengonfirmasi bahwa Pemerintah RI akan melakukan investigasi dan mengajukan klaim kompensasi. Tim advokasi pencemaran Laut Timor dibentuk dan dipimpin Masnellyarti Hilman dari KLH.
- 20 Juli 2010 : Presiden RI mulai memberikan pernyataan kepada publik bahwa Indonesia akan mengajukan klaim kompensasi kepada PTTEP. Staf khusus presiden, Velix Wanggai, menyatakan bahwa tim investigasi telah berada di NTT.
- 26 Agustus 2010 :
  - Pertemuan tim advokasi pencemaran Laut Timor dan PTTEP.
  - Pemerintah mengklaim kompensasi hingga Rp 22 triliun kepada PTTEP.
- 28 Agustus 2010 : PTTEP menolak klaim dan tidak mengakui data ilmiah versi Pemerintah RI.
- Oktober 2010 : Pemerintah RI menyerahkan dokumen riset yang telah diperbarui kepada PTTEP.
- 18 November 2010 : PTTEP kembali menolak klaim Pemerintah RI.<sup>9</sup>

Pihak Australia sendiri juga menyatakan telah mengambil tindakan dalam menanggulangi pencemaran yang terjadi terkait dengan ledakan kilang minyak Montara tersebut. Antara lain operasi penyelamatan atau pembersihan laut dari tumpahan minyak tersebut berlangsung, setelah lima kali percobaan kebocoran berhasil ditutup menggunakan lumpur sebanyak 3.400 barel yang dipompakan ke

---

<sup>9</sup> <http://www.migas.esdm.go.id/tracking/berita-kemigasana/detil/253897/Kronologi-Tumpahan-Minyak-Montara>

sumur minyak. Terkait dengan penganggulan pencemaran tersebut, pemerintah Australia menyatakan fokus pada pembatasan dampak tumpahan minyak dari sumur minyak Montara dan akan terus memberikan informasi yang terbaru kepada pihak berwenang di Indonesia. Prioritasnya adalah untuk meminimalisir dampak tumpahan minyak pada lingkungan hidup yang dalam hal ini lingkungan laut, khususnya perairan antara Indonesia dengan Australia. Bagian terbesar dari tumpahan minyak terdapat di perairan Australia di suatu area di dekat sumur minyak Montara. Tindakan pembersihan besar-besaran berlangsung dengan menerapkan pengurai dan melakukan operasi pengendalian dan pemulihan dengan menggunakan *boom* dan *skimmer*.

Australia juga menyatakan telah memonitor gerakan gumpalan-gumpalan minyak yang telah terurai dan lapisan minyak melalui penerbangan di atas laut setiap hari, dimana penerbangan terakhir dilakukan pada Selasa 27 Oktober. Penerbangan tersebut mengindikasikan gumpalan-gumpalan minyak yang telah terurai dan lapisan minyak tetap berada di ZEE Indonesia. Gumpalan minyak yang telah terurai teramati pada 21 September, sekitar 94 kilometer sebelah tenggara Pulau Roti. Penerbangan di atas mengindikasikan yang terdapat di ZEE Indonesia utamanya adalah lapisan minyak, dengan kadang kala gumpalan kecil minyak yang telah terurai. Bagian utama tumpahan minyak kini berada lebih dari 248 kilometer dari garis pantai Indonesia.

Australia terus memonitor situasi dan selalu memberi tahu Indonesia tentang gerakan minyak dan lapisan minyak, dan upaya tanggap kami yang ekstensif. Kami akan melakukan koordinasi secara dekat dengan pihak berwenang Indonesia tentang upaya monitor mereka. Sebagai bagian dari tanggapan terus-menerus terhadap tumpahan minyak, dua kapal tanggap memasuki ZEE Indonesia pada 23 September 2009 untuk melakukan operasi pengendalian dan pemulihan, dengan menggunakan *boom* dan *skimmer* tumpahan minyak, pada gumpalan-gumpalan minyak yang lebih kental yang terlihat dari pesawat udara. Upaya ini didukung oleh pesawat terbang di udara untuk mengarahkan kapal ke gumpalan-gumpalan minyak yang lebih kental. Australia memberi tahu Indonesia tentang kehadiran kapal tersebut dan kegiatan mereka di ZEE Indonesia. Operasi ini selesai dilakukan dalam beberapa hari dan

kapal tersebut telah kembali ke ZEE Australia dan kini beroperasi di sekitar anjungan.<sup>10</sup>

**2. Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan ketentuan yang diatur dalam konvensi hukum laut 1982 terkait dengan penyelesaian pencemaran lintas batas tersebut?**

Kendala yang dihadapi dalam penerapan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 terkait penyelesaian pencemaran lintas batas antara Indonesia dengan Australia antara lain adalah Hukum Laut lebih mengatur mengenai "Tanggung Jawab Setiap Negara" Tidak diatur didalamnya perihal nilai ganti rugi yang harus diberikan oleh Negara yang melakukan pencemaran. Meskipun UNCLOS telah mengatur mengenai hak dan kewajiban setiap negara dalam mengelola kekayaan hayati yang ada dilaut namun tetap saja ada kendala yang dihadapi dalam penerapan UNCLOS dalam masalah yang terjadi antara Indonesia dengan Australia. Salah satunya adalah penentuan ganti rugi yang dilihat dari sudut materiil tidaklah diatur secara pasti didalam UNCLOS. Namun UNCLOS mengatur lebih kepada "kewajiban" ganti rugi dengan kata lain pertanggung jawaban.

Kemudian kendala lainnya adalah Indonesia tidak mempunyai bukti yang kuat untuk melakukan gugatan. Terkait dengan adanya laporan tes positif minyak Australia akan membahas laporan ini dengan pemerintah Indonesia dan melakukan pengujian sampel untuk dibandingkan dengan sampel dari minyak Montara atau minyak yang lazim beredar di perairan Timur Indonesia. Australia menyatakan sangatlah kecil kemungkinannya bahwa minyak Montara akan mencapai perairan pesisir Indonesia. Terkait dengan Laporan Banyaknya Ikan yang mati, Australia telah melakukan pengujian tingkat keracunan (*toxicity*) pada ikan yang terdapat di sekitar tumpahan minyak di perairan Australia, dan hasilnya memperlihatkan ketiadaan kontaminasi. Jenis dan jumlah minyak yang diamati di ZEE Indonesia dipandang tidak mengakibatkan ancaman signifikan pada lingkungan laut. Terkait dengan pernyataan adanya upaya tanggap dari Australia untuk menanggulangi masalah ini.

---

<sup>10</sup> [Http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/home.html](http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/home.html) (pernyataan Kedutaan besar Australia di Indonesia terhadap Pers)

Kemudian kendala terakhir dalam penyelesaian masalah pencemaran lintas batas ini adalah Indonesia tidak melakukan tindakan pencegahan sebagaimana telah ditetapkan dalam UNCLOS 1982. Sejak terjadinya kasus kegagalan dalam pengeboran yang dilakukan oleh PTTEP Australia di Montara, belum ada tindakan-tindakan perlindungan ataupun pencegahan terhadap pencemaran lingkungan laut dan biota laut di laut Timor dari pihak Indonesia sendiri, padahal dalam kasus ini Indonesia merupakan negara yang wilayah lautnya tercemar oleh minyak yang diakibatkan aktifitas pengelolaan laut negara tetangga Australia. Hal ini yang memberatkan Indonesia manakala Indonesia akan membawa kasus Montara ke Pengadilan Internasional, dikarenakan Indonesia sendiri tidak mengambil tindakan penanggulangan yang cepat sejak terjadinya kebocoran.



## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Menyikapi permasalahan ini sudah sepatutnya kedua belah pihak mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan yang telah diatur didalam UNCLOS 1982, dikarenakan kedua negara juga sama-sama telah meratifikasi UNCLOS 1982 sehingga kedua negara memiliki ikatan hukum dengan UNCLOS 1982 mana kala terjadi sengketa terkait dengan laut internasional.

Indonesia memang telah mengambil tindakan atas kasus pencemaran yang terjadi, yaitu diawali dengan pembentukan posko untuk memonitor tumpahan minyak Montara langsung ke lapangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemudian WWF Indonesia membuat *press release* tentang kasus Montara dan mendorong Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah Australia untuk melindungi kawasan Coral Triangle. Selain itu beberapa menteri RI (Luar Negeri, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, serta Lingkungan) juga telah melakukan koordinasi untuk menangani isu minyak Montara dan menunjuk Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, yang diketuai Freddy Numbet, untuk bernegosiasi tentang kompensasi. Kemudian Indonesia mengajukan klaim kepada pemerintah Australia, yang membuat diadakannya pertemuan tim advokasi pencemaran laut timor dan PTTEP. Dalam klaimnya, Indonesia mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Australia, hanya saja Australia menolak dengan dalih tidak disertai dengan data yang Valid.

Terkait dengan upaya kedua negara terhadap penanggulangan pencemaran laut yang diakibatkan oleh ledakan kilang minyak di Australia ini, Australia sendiri telah melakukan sedikitnya lima kali percobaan. Yang pada akhirnya kebocoran berhasil ditutup menggunakan lumpur sebanyak 3.400 barel yang dipompakan ke sumur minyak. Selama proses penanggulangan, Australia menyatakan terus memberikan informasi yang terbaru kepada pihak berwenang di Indonesia. Selain dengan menutup sumber ledakan dengan lumpur, tindakan pembersihan besar-besaran berlangsung dengan

menerapkan pengurai dan melakukan operasi pengendalian dan pemulihan dengan menggunakan *boom* dan *skimmer*.

Dimana upaya ini didukung oleh pesawat terbang di udara untuk mengarahkan kapal ke gumpalan-gumpalan minyak yang lebih kental. Australia memberi tahu Indonesia tentang kehadiran kapal tersebut dan kegiatan mereka di ZEE Indonesia. Operasi ini selesai dilakukan dalam beberapa hari dan kapal tersebut telah kembali ke ZEE Australia dan kini beroperasi di sekitar anjungan.

Meskipun Kilang Minyak Montara tersebut merupakan milik dari suatu Perusahaan Thailand, akan tetapi bila melihat pada prinsip tanggung jawab negara maka Australia tetap harus bertanggung jawab sebagai negara tempat pengeboran dilakukan dengan kata lain Tanggung Jawab tersebut merupakan Tanggung jawab yang bersifat Absolut atau mutlak. Dikarenakan selain telah melakukan pencemaran, pencemaran tersebut juga telah masuk dan mencemari wilayah perairan Indonesia serta telah menyebabkan kerugian bagi Indonesia khususnya penduduk sekitar laut Timor.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Konvensi Hukum Laut 1982 dalam kasus pencemaran lintas batas yang diakibatkan kilang minyak montara ini adalah meskipun dalam UNCLOS 1982 dituliskan secara jelas perihal tanggung jawab negara dalam akan tetapi UNCLOS 1982 tidak menentukan sistem pengganti kerugian yang dapat dijadikan dasar dalam penyelesaian kasus pencemaran lintas batas antara Indonesia dengan Australia. Hal ini yang menjadi salah satu kendala bagi Indonesia dalam menentukan besarnya ganti rugi yang harus dipenuhi Australia.

Bagi Indonesia sendiri kendala yang dihadapi dalam mengajukan klaim ganti rugi terhadap pemerintah Australia adalah Indonesia tidak memiliki data-data yang kuat untuk dapat dijadikan sebagai dasar tuntutan. Kemudian pemerintah Australia cepat mengambil tindakan penanggulangan terhadap pencemaran tersebut, sedangkan Indonesia yang dalam kasus ini merupakan negara penderita, dikarenakan wilayah laut nya (Laut Timor) tercemar oleh muntahan minyak yang berasal dari ledakan kilang minyak lepas pantai

Montara di Australia, lamban dalam melakukan pencegahan pencemaran. Dikarenakan lambanya respon dari pemerintah Indonesia dalam menangani kasus tersebut hal itu berdampak pada pertimbangan Indonesia untuk mengangkat kasus ke pengadilan internasional, dikarenakan hal itu berarti bahwa Indonesia tidak menjalankan MoU antara Indonesia dengan Australia terkait dengan perlindungan laut dari pencemaran serta respon yang cepat terhadap pencemaran laut antara kedua negara.

## **B. SARAN**

1. Dalam melakukan penyelesaian sengketa pencemaran lintas batas tersebut Indonesia dengan Australia sudah seharusnya kedua negara melakukan penelitian serta melakukan pengambilan sampel langsung ke lapangan secara bersama-sama, ditempat atau titik yang dirasa oleh kedua negara baik Indonesia maupun Australia mengalami pencemaran langsung ataupun terkena dampak dari pencemaran laut tersebut. Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa Indonesia memang telah mengambil tindakan atas kasus pencemaran yang terjadi, yaitu diawali dengan pembentukan posko untuk memonitor tumpahan minyak Montara langsung ke lapangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT). Akan tetapi seharusnya Indonesia lebih memanfaatkan keberadaan Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, yang diketuai Freddy Numbed, untuk mengambil tindakan cepat dan tanggap terhadap pencemaran laut maupun dampaknya. Selain itu TIMNAS Penanggulangan Keadaan Darurat tersebut tentunya memiliki hak penuh sebagai perwakilan dari Indonesia untuk bernegosiasi maupun mengajukan gugatan kepada Australia.
2. Baik Indonesia maupun Australia, dalam menghadapi kasus pencemaran laut baik itu terjadi didalam negara sendiri maupun kasus pencemaran lintas batas seperti diatas, sudah seharusnya melakukan tindakan-tindakan sebagaimana telah ditentukan dalam UNCLOS 1982, karena UNCLOS 1982 mengandung dasar-dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan sengketa terkait dengan laut internasional. Terlebih Indonesia dan Australia merupakan

negara yang meratifikasi UNCLOS 1982, hal tersebut mengakibatkan Indonesia dan Australia terikat secara hukum dengan negara-negara lain yang juga telah meratifikasi UNCLOS 1982 walaupun hukum nasional dari masing-masing negara tersebut juga memiliki hukum positifnya sendiri terkait dengan pencemaran laut.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku :

- D.J. Harris, 1983, *Case and Materials on International Law*, London : Sweet and Maxwell, Edisi ke-3.
- Hermann Mosler, 1980, *The International Society as A Legal Community*, Nijhoff.
- Bin Cheng, 1987, *General Principles of Law*, Grotius Publications Limited, Cambridge.
- David H, Ott, 1987, *Public International Law in The Modern World*, Pitman Publishing, London.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, 1999, *Immunutas Kedaulatan Negara Di Forum Pengadilan Asing*, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1994, *Tinjauan Sosiologis Hukum Lingkungan, Jurnal Hukum Lingkungan*, Tahun I Nomor I, ICEL, Jakarta.
- Silalahi, Daud, 1994, *Perangkat Hukum Nasional, Regional dan Internasional dalam Pembangunan yang berkelanjutan*, Jurnal Hukum Lingkungan, Tahun 1 Nomor 1, ICEL, Jakarta.
- Em Juk Fajri, Ratu Aprilia Senja, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Difa Publisher.
- Amirudin, Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Starke, J. G., 2004, *Pengantar Hukum Internasional 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suwardi, Sri Setianingsih, 2006, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, UI-Press, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro S.H. 1984, *"Hukum Laut Bagi Indonesia"*, Sumur Bandung, Bandung.
- Muhdar, Muhamad, 2011, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum: Sub Pokok Bahasan Penulisan Hukum Skripsi*, Balikpapan.
- Dr. Hasjim Djalal, 1979, *"Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut"*, Penerbit Binacipta, Bandung.
- Prijanto, Heru, 2007, *"Hukum Laut Internasional"*, Bayumedia, Malang

Sucipto S.H., 1984, *"Implementasi Konvensi Hukum Laut III Tentang Pencemaran Laut Dalam Rangka Wawasan Nusantara"*

Dr. M. Daud Silalahi, 1992, *"Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implikasinya Secara Regional"*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka  
Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 tentang *"Landas Kontinen Indonesia"*

## **2. Undang-Undang :**

Undang-Undang No. 4 Tahun 1982

Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang *"Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)"*

Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 Tentang *"Perikanan"*

Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 (UU peratifikasi UNCLOS 1982)

Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang *"Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya"*

Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 Tentang *"Pelayaran"*

Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 Tentang *"Perairan Indonesia"*

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang *"Perlindungan Lingkungan Hidup" (UUPLH)*

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Pengrusakan Laut

HIR pasal 130 dan Rbg pasal 154

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun

## **3. Konvensi :**

United Nation on The Law of The Sea (UNCLOS 1982)

Liability Convention 1972 *"The Convention on International Liability for Damage Cause by Space Object 1972"*

Konvensi Jenewa 1958 *"Convention on The Territorial Sea and Contiguous Zone"*

Deklarasi Stockholm tahun 1972

Deklarasi Juanda 13 Desember 1957

The Regulations the Procedur of International Conciliation Tahun 1961

Convention on Liability for Oil Pollution Damage 1969

Protocol 1992 (CLC 1969)

**4. Website :**

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e2e9db27e4f9/pemerintah-didesak-tuntaskan-kasus-blok-montara> Selasa, 26 Juli 2011. Diakses pada tanggal 16 agustus 2012

<http://indomaritimeinstitute.org/?p=274>, "*Pencemaran Lingkungan , Tumpahan Minyak dari Celah Timor Rusak Ekosistem Laut*". 24 Juli 2010, 2:56 am. Diakses pada tanggal 16 agustus 2012

<http://rahmawidhiasari.blogspot.com/>, "*Mengkritisi Kelambatan Pemerintah dalam Penyelesaian Pencemaran Minyak Montara*". Senin, 05 Maret 2012. Diakses pada tanggal 16 agustus 2012

<http://indomaritimeinstitute.org/?p=274>, "*Pencemaran Lingkungan , Tumpahan Minyak dari Celah Timor Rusak Ekosistem Laut*". 24 Juli 2010, 2:56 am. Diakses pada tanggal 16 agustus 2012

<http://geografi-geografi.blogspot.com/2011/01/pengertian-lingkungan-hidup-menurut.html>

<http://organisasi.org/definisi-pengertian-laut-jenis-macam-laut-fungsi-peran-manfaat-laut>

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/international-law/2117271-pengertian-laut-teritorial/#ixzz27z5gDDs3>. 14 Februari, 2011 diakses pada tanggal 18 agustus 2012

<http://www.ristek.go.id/?module=News%20News&id=5456>

<http://3jauhari.blogspot.com/2011/11/penyelesaian-sengketa-internasional.html>

<http://www.antaranews.com/berita/323534/indonesia-harus-cepat-tangani-pencemaran-minyak-montara>

<http://www.brok.kkp.go.id/news/136/BROK-memantau-dampak-oil-blasting-Montara>/diakses pada tanggal 3 april 2013 pukul 18.00 WIB

<http://www.goblue.or.id/tumpahan-minyak-montara-terus-ancam-laut-timor>

<http://www.migas.esdm.go.id/tracking/berita-kemigasan/detil/253897/Kronologi-Tumpahan-Minyak-Montara>

<http://rahmawidhiasari.blogspot.com/2011/08/mengkritisi-kelambatan-pemerintah-dalam.html> diakses pada 03 april 2013 pukul 16.00

<Http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/home.html> (pernyataan Kedutaan besar Australia di Indonesia terhadap Pers)

<http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/home.html>

<http://www.fajar.co.id/read-20111003092804-yptb-pertanyakan-keseriusan-pemerintah>

<http://pendidikandanhukum.blogspot.com/2011/06/tanggung-jawab-mutlak-strict-liability.html>

<http://materifakultashukum.blogspot.com/2012/04/hukum-laut-internasional-dan.html>

<http://linggaakmil98.blogspot.com/2011/03/v-behaviorurldefaultvml-o.htm>